**BAB 1**

**Pendahuluan**

**A.Latar Belakang Penelitian**

Kota menjadi pusat pembangunan sektor formal, maka kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa.Diantara berbagai macam pembangunan yang dilaksanakan salah satunya adalah program pembangunan lingkungan yang bertujuan menyerasikan interaksi antara masyarakat dengan alam lingkungannya.

Kota bagaikan mempunyai kekuatan magis yang mampu menyedot warga desa, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kondisi tersebut di atas dikenal dengan teori faktor pendorong *(push factor)* dan faktor penarik *(pull factor)* dalam urbanisasi. Akan tetapi kota tidak seperti apa yang diharapkan kaum migran. Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya ditampung sektor formal.

Masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat, merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama sama. Masalah tumbuh dengan seiring dinamika kehidupan masyarakat, Dimana kesejahteraan sosial mempunyai kewajiban untuk memberi soslusi bagi masalah masalah yang muncul

 Permasalahan Kesejahteraan Sosial dewasa ini semakin bervariasi. Oleh karena itu perlu diimbangi dengan upaya penanggulangan yang intensif dan terkoordinir agar tujuan pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial dapat berhasil. Salah satu masalah kesejahteraan sosial dewasa ini yang memerlukan penanggulangan dan solusi adalah masalah pedagang kaki lima yang telah menjamur disetiap sudut kota Bandung.

 Pedagang kaki lima ini terjadi disebabkan karena sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan disektor formal akibat ketidak seimbang atara jumlah penduduk usia angkatan kerja dengan kesempatan kerja dilapangan usaha. Ketimpangan ini bertambah rumit karena bekal pendidikan dan keahlian yang relatif rendah sedangkan lapangan kerja formal menuntut pengetahuan dan kemampuan teknik yang relatif tinggi.

Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum.Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah smua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak PKL

Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung, Pertumbuhan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung, Jawa Barat, meningkat dalam 3 tahun terakhir, mencatat jumlah PKL pada tahun 2012 mencapai 20.326 pedagang, pada tahun 2015 jumlah itu meningkat menjadi 22.539 pedagang, Ironisnya jumlah pedagang kaki lima yang makin banyak dan tidak terkendali sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung. Sebaliknya timbul kekumuhan dan kesemerawutan kota.

 Hal ini tidak terlepas dari kondisi lokasi kota bandung yang sangat strategis dengan cuaca sejuk dan nyaman, serta didukung oleh saratnya fasilitas fasilitas umum dan mobilitas masyarakatnya yang dinamis dan tinggi. Sehingga kota Bandung menyandak fungsi sebagai kota pedagangan. Oleh karena itu kota Bandung dianggap surga bagi para pelaku perdagangan yang dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut http://[www.balebandung.com](http://www.balebandung.com) (1/07/2015) tentang pedagang kaki lima yang ditertibkan “Kawasan jln. Merdeka Kota Bandung Pedagang kaki lima mengamuk akibat dagangannya diangkut para petugas Satpol PP Kota Bandung. Bahkan saat salah satu pedagang diangkut barang dagangannya, pedagang merangsek meminta agar barang dagangannya tak dibawa ke Kantor Satpol PP”

Menurut <http://www.infobandung.co.id> (20/08/2015) tentang PKL mengenai aturan baru “Kami mendukung kinerja Satpol PP mereka tahu bagaimana kondisi kami di lapangan dan mereka turun terus ke lapangan. Kami kecewa terhadap birokrasi yang betugas sebagai pengawas dalam peraturan perwal tersebut, cobalah mereka turun ke lapangan dan beraudiensi dengan kami,”

Persoalan mengenai relokasi tersebut sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun terakhir ini setelah dikeluarkan Perda mengenai lokasi yang diperbolehkan untuk berdagang bagi PKL. Pedagang yang dipindahkan dari Kawasan Jln.merdeka Kota Bandung merasa keberatan karena tempat tersebut merupakan tempat yang menjanjikan bagi penghasilan mereka.

Tampak Kekumuhan kota akibat kerumunan pedagang yang tidak tertib yang cenderung asal dapat menggelaer dagangannya, kebersihan dan keindahan kota mebnjadi tidak terpelihara akibat buangan sampah yang tidak pada tempatnya serta tenda - tenda pedagang kaki lima yang tidak dibereskan, meningkatnya kerawanan terhadap gangguan ketertiban masyarakat akibat terjadinya benturan kepentingan dan persaingan lahan usaha, kesemerawutan dan ketidak nyamanan hal ini disebabkan oleh fungsi – fungsi sosial dan fasilitas umum yang ada telah berganti menjadi tempat usaha para pedagang kaki lima seperti ruas jalan yang akhirnya menyebabkan kemacetan , trotoar, taman jalur hijau, persimpangan jalan dan tempat – tempat lain yang bukan untuk berjualan, hal ini menyebabkan ketidakteraturan, kekumuhan dan gangguan aktifitas.

Melihat masalah pedagangan kaki lima di kota Bandung maka pemerintah kota berdasarkan PERDA No.6 Tahun 1995 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan, surat edaran Walikota No. 511/23/SE.073-Huk 2001 Tgl 12 Desember 2001 Perihal Penertiban pedagang kaki lima mengadakan penertiban pedagang kaki lima yang merupakan program pemerintah kota Bandung untuk mencegah terjadi kekacauan dan kesemerawutan kota yang disebabkan oleh para pedagag kaki lima untuk tidak berjualan khususnya di tujuh lokasi yang sudah ditentukan.

Melalui Keputusan Walikota Bandung No.511.23/Kep.1322-Huk/2001 Tgl 11 Desember 2001 tentang lokasi yang bebas dari kegiatan pedagang kaki lima, di mana lokasi sebagaimana dimaksudkan adalah : kawasan Alun-alun dan sekitarnya, Jl. Dalem kaum dan Jl. Dewi sartika, Jl. Kepatihan, Jl. Asia Afrika, Jl. Otto Iskandardinata, Jl. Jend. Sedirman, Jl. Merdeka. Sesuai dengan Kep. Walikota bandung No.511.23/Kep.1321-Huk/2001 tgl 11 Desember 2001 tentang Tim Penertib Pedagang kaki lima maka sebaga pelaksana program penertiban pedagang kaki lima berada dibawah Satuan Polisi Pamong Praja. Yang penertibannya dimulai sejak malam Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah sampai dengan sekarang

Keputusan Walikota tersebut direalisasikan mulai tangal 15 Desember 2001 hasilnya cukup memuaskan karena kota Bandung kembali pada wajah semula dan dukungan masyarakat pun terus mengalir. Namun setelah penertiban para pedagang kaki lima kembali berjualan dengan cara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya terjadi bentrokan dan demo dari para pedagang kaki lima hingga terjadi pengerusakan berbagai fasilitas dan kendaraan. Kondisi ini semakin memberikan kelonggaran bagai para pedagang kaki lima dengan diperbolehkannya kembali mereka untuk berjualan pada tujuh titik tersebut.

Untuk dapat terciptanya ketertiban lingkungan diharapkan para pedagang kaki lima ini dapat menjalankan segala tata tertib dengan baik sehingga dapat terciptanya suatu ketertiban dan keamanan lingkungan di tempat mereka berdagang dengan tidak melanggar segala aturan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat terciptanya suatu perilaku sosial saling menghargai antar sesamanya.

Disamping itu jenis usaha ini juga memberikan dampak ikutan yang menguntungkan *(positive spillovers)* seperti mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, membantu proses daur ulang beberapa jenis sampah, serta menjadi alternative terbaik bagi kelompok berdaya beli rendah.

Meningkatnya kompleksitas permasalahan antar pedagang kaki lima dengan tim penertib, di satu sisi upaya menertibkan para pedagang kaki lima khususnya Jln.Merdeka Kota Bandung sesungguhnya merupakan suatu hal yang positif. Disisi lain pedagang ini adalah masyarakat yang mencari rezeki sesuap nasi guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga jangan sampai muncul persoalan baru dengan diadakannya penertiban pedagang kaki lima, dimana pedagang ini kehilangan fungsi sosial dengan peranan, status dan tuntutan kerja. Dalam hal ini pemerintah kota Bandung perlu memikirkan nasib para pedagang dimasa penertiban serta perlu dicari pertimbangan baru yang lebih memberikan kepastian terhadap nasib pedagang karena jika tidak mau dikemanakan nasib para pedagang ini.

Dalam hal penertiban pedagang kaki lima Pemerintah kota Bandung membentuk Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegak Peraturan Daerah (PERDA) dan keputusan Walikota. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.

Sedangkan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah mengendalikan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Ketertiban Umum (Tramtibum dan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.Dengan adanya penertiban terhadap pedagang ini diharapkan para pedagang kaki lima dapat menyadari apa-apa saja yang boleh dan tidak untuk dilakukan dengan baik sehingga tidak menggangu kepentingan orang banyak.

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan penelitian : “Hubungan Antara Persepsi PKL Tentang Penertiban Dengan Penyesuaian dirinya Dijalan Merdeka Kota Bandung”. Identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi PKL Tentang Penertiban di jalan Merdeka Kota Bandung
2. Bagaimana Penyesuaian Dirinya dijalan Merdeka Kota Bandung
3. Bagaimana Hubungan Persepsi PKL Tentang Penertiban Dengan Penyesuaian Dirinya di jalan Merdeka Kota Bandung

**C.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

 Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan tentang Hubungan Antara Persepsi PKL tentang Penertiban Dengan Penyesuaian Dirinya Di jalan Merdeka Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mendeskripsikan Persepsi PKL Tentang Penertiban Di jalan Merdeka Kota Bandung.
2. Untuk Mendeskripsikan Penyesuaian Dirinya Di jalan Merdeka Kota Bandung.
3. Untuk Mendeskripsikan Hubungan Antara Persepsi PKL Tentang Penertiban Dengan Penyesuaian Dirinya Dijalan Merdeka Kota Bandung.

**2.Kegunaan Penelitian**

Penelitian dibutuhkan untuk memberi manfaat signifikan dalam suatu realita sosial, maka dari itu penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Keguanaan atau Manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran yang mendalam bagi pengembangan teori – teori kesejahteraan sosial dan praktek pekerja sosial yang berkaitan dengan Persepsi PKL Tentang Penertiban Dengan Penyesuaian Dirinya Dijalan Merdeka Kota Bandung.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam pemikiran kepada pihak pengelola dan masyarakat dapat memahami hubungan persepsi PKL tentang penertiban dengan Penyesuaian dirinya Dijalan Merdeka Kota Bandung, serta agar masyarakat tidak mempunyai pandangan yang negatif tentang keberadaan PKL

**D. Kerangka Pemikiran**

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan dibidang sosial yang berorientasi kepada masyarakat dan masalah sosial yang ada dikehidupan masyarakat tersebut. Kajian utama dari ilmu kesejahteraan sosisal adalah *social fungtioning* (keberfungsian sosial). Keberfungsian sosial mencakup tentang bagaimana interaksi yang ada dimasyarakat baik dengan individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan masyarakat. Definisi kesejahteraan sosial menurut Friedlander 1961 dalam Fahrudin (2012:19) dalam buku pengantar kesejahteraan sosial ,sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial adalah sistem pelayanan pelayanan dan instusi–instusi yang terorganisasi yang dirancang untuk membantu individu–individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan, serta hubungan-hubungan pribadian sosial yang memuaskan dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan penuh mereka dan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka dan masyarakat

 Kesejahteraan sosial yang dimaksud menyangkut tentang pemenuhan kebutuhan dan bagaimana seorang individu dapat menjalankan perannya dengan baik, serta merupakan program-program bantuan materi dan pelayanan-pelayanan termasuk undang-undang yang melandasinya mencapai kondisi sejahtera.

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu kajian ilmiah yang ruang lingkupnya selalu dihadapkan dengan berbagai macam persoalan dan masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat. Menurut Horto dan Lestie (Edi Suharto,1997:157) “Memberi pengertian masalah sosial sebagai suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif”. Dari pernyataan diatas bahwa masalah sosial berbeda dengan masalah individual yang telah ada.

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan sfungsi sosialnya. Kesejahteraan Sosial yang dimaksud juga menyangkut tentang pemenuhan kebutuhan dan bagaimana seorang individu dapat menjalankan perannya dengan baik, serta merupakan program-program.

 Kehidupan manusia pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari permasalahan sosial.karena masalah sosial terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri dan akibat dari hubungan dengan manusia lainnya.masalah masalah sosial yang dihadapi masyarakat tidaklah sama antara yang satu dengan yang lainnya, secara garis besar masalah sosial disebabkan oleh perbedaan tingkat perkembangan kebudayaan dan masyarakatnya.

Masalah individual dapat diatasi secara perorangan atau satu persatu, tetapi masalah sosial dapat diatasi melalui rekayasa sosial *(social engineering)* seperti aksi sosial, kebijakan sosial, perencanaan sosial, pembangunan sosial karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang dan harus mendapat solusinya.

Dengan demikian bahawa masalah sosial merupakan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan dan pembangunan yang berdampak buruk bisa mengakibatkan situasi-situasi sosial atau permasalahan-permasalahan sosial yang bisa mengganggu dan merugikan banyak orang . Masalah Sosial menurut Soetarso (Huraerah,2011 :8) dalam buku Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat:

Masalah sosial adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat yang diperlakukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama. Dan masalah sosial adalah situasi yang dianggap oleh sebagian besar orang dari warga masyarakat sebagai mengganggu ,tidak dikehendaki, berbahaya dan mencurigakan orang banyak. Maka tingkah laku yang dianggap sebagai tidak cocok, melanggar norma dan adat istiadat atau tidak terintergrasi dengan tingkah laku umum.dianggap sebagai masalah sosial

Definisi diatas menjelaskan bahwa masalah sosial terjadi apabila semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat untuk kepentingan kesejahteraan maka terjadilah masalah sosial, banyak yang mengalami masalah sosial terutama masalah ekonomi.

Definisi pembangunan mebnurut Portes (1979) dalam ali dan syamsu alam (2012:183) yaitu : “pembangunan sebagai tranformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat”. Konsep tersebut mengandung arti bahwa pembangunan upaya perbaikan demi memajukan kehidupan kearah yang lebih baik yang dilakukan secara terrencanaoleh pemerintah dalam pemberdayaan terhadap masyarakat terutama pada pedagang kaki lima (PKL) telah tercantum pada perda serta perencanaan yang lebih spesifik untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dikota.

Definisi perencanaan sosial itu sendiri menurut conyer (suharto,2007:182): “perencanaan sosial adalah perencanaan perundang undangan tentang pelayanan kesejahteraan sosial dalam berbagai hal”. Definisi diatas terkait dengan berbagai upaya dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam menangani keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang semakin tahun meningkat sehingga pemerintah kota harus merencanakan solusi, untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota sesuai dengan visi-misinya.

Definisi pedagang kaki lima (PKL) Menurut karafir dalam ali dan syamsu alam (2012:186): “bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang berjualan disuatu tempat umum seperti tepi jalan, taman – taman, emper toko dan pasar pasar pasar tnpa izin usaha dari pemerintah”. Bertolak dari pernyataan tersebut bahwa pedagang kaki lima adalah ,mereka yang berusaha ditempat tempat umum dan tidak mendapat izin dari pemerintah. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa keberadaan pedagang kaki lima menggangu kenyamanan pengguna kota atau kawasan karena melakukan kegiatan ekonomi terhadap kepentingan umum sehingga dilakukan penanganan dan penertiban yang khusus ke tempat-tembat yang selayaknya untuk para sector informal khususnya diindonesia.

Keberadaan PKL diperkotaan sering menjadi bahan perdebatan yang pro maupun kontra. Adanya kebijakan pemerintah dalam penanganan PKL ini di perkotaan sering menimbulkan pandangan yang berbeda beda pada setiap orang begitu juga dengan PKL yang terkait pandanga padangan yang sering timbul dari diri seseorang tanpa paksaan dari pihak luar disebut juga persepsi.

 Persepsi merupakan proses memberi makna terhadap stimulus yang berupa informasi mengenai lingkungannya yang diterima oleh panca inderanya yang di tentukan juga oleh faktor personal dan situasional. Faktor personal dapat dilihat dari faktor keberfungsian dari panca indera, sendangkan situasional dapat dilihat keadaan pada saat individu tersebut menerima rangsang, sehingga semuanya dapat terlihat. banyak para ahli mengertikan tentang persepsi berikut salah satu pengertian persepsi. Pengertian persepsi menurut Rahmat (2012:50) dalam buku psikologi komunikasi sebagai berikut :

Persepsi adalah pengalaman tantang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi *(sensory stimuli)*

Definisi di atas menunjukkan bahwa persepsi merupakan pemberian makna pada stimulus yang diterima. Persepsi atau pandangan yang dikeluarkan oleh setiap individu akan berbeda dengan yang lainnya, begitu juga dengan persepsi setiap individu tentang penertiban dijalan merdeka Kota Bandung yang direlokasikan ke basement mall BIP dan mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru.

Persepsi pada dasarnya menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya, bagaimana ia mengerti dan menginterpretasikan stimulus yang ada dilingkungannya dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki, setelah individu menginderakan objek lingkungannya, kemudian ia memproses hasil penginderaannya itu, sehingga timbullah makna tentang objek tersebut.

Suatu persepsi akan menimbulkan reaksi seseorang untuk dapat menyesuaikan dirinya pada keadaan yang telah ia persepsikan, meskipun setiap individu memiliki anggapan masing masing tentang makna dari suatu objek, namun setiap individu berhak untuk menyelaraskan anggapannya pada sebuah tindakan. Jadi persepsi PKL tentang penertiban dengan penyesuauian dirinya sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan PKL untuk meraih perubahan dan mampu menyesuaikan ditempat baru.

Penyesuian diri berhubungan dengan masalah yang timbul akibat adanya berbagai perubahan fisik dan psikis yang menyertai pertumbuhan usia dan sebagai akibat perubahan pola kehidupan mereka butuhkan. Definisi penyesuian diri menurut Kartono (2002:260) yaitu :

Penyesuian diri adalah kemampuan untuk dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa *survive*, dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah juga dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntunan-tuntunan sosial.

 Mengacu pada definisi diatas tentang penyesuaian diri maka peneliti mengambil definisi yang terdiri dari (1) kemampuan mempertahankan diri/*survive,* (2) Memperoleh kesejahteraan jasmaniah atau terpenuhinya kebutuhan fisik (3) Memperoleh kesejahteraan rohaniah atau terpenuhinya kebutuhan mental (4) kemampuan mengadakan relasi.

 Penyesuaian diri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan para PKL untuk mempertahankan diri atau *survive* dilingkungan baru. Penyesuaian diri akan mendapatkan hasil yang baik jika apa yang dirasakan oleh jasmani dan rohaninya telah sejahtera, namun penyesuaian yang satu dengan yang lainnya pun dapat berbeda beda. Perbedaan itu terlihat dari minat dan antusias seseorang dalam menyikapi ilmu ilmu yang didapatkan, penyesuaian yang dilakukan seperti mereka harus memahami ilmu, nilai, dan prinsip prinsip dasar kesejahteraan sosial. Penyesuaian diri bukan merupakan upaya pemaksaan kehendak, proses yang dipaksa tetapi merupakan program yang mengajak masyarakat untuk berinisiatif mengembangkan keterampilan yang dimilikinya.

Berdasarkan Kerangka Pemikiran diatas , maka dengan dilaksanakannya Hubungan Antara Persepsi PKL tentang Penertiban Dengan Penyesuaian Dirinya Di jalan Merdeka Kota Bandung.

**E.Hipotesis**

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis utama yaitu sebagai berikut :

H0 : Tidak Terdapat Hubungan Antara Persepsi PKL Tentang Penertiban Dengan Penyesuaian Dirinya Di jalan Merdeka Kota Bandung

H1 : Terdapat Hubungan Antara Persepsi PKL Tentang Penertiban Dengan Penyesuaian Dirinya Di jalan Merdeka Kota Bandung

Adapun Sub-Sub Hipotesisnya :

1. H0 : Tidak Terdapat Hubungan Antara Persepsi PKL Tentang Penertiban Dengan Kemampuan mempertahankan diri Dijalan Merdeka Kota Bandung

H1 : Terdapat Hubungan Antara Persepsi PKL Tentang Penertiban Dengan Kemampuan mempertahankan eksistensinnya Dijalan Merdeka Kota Bandung. Semakin baik persepsi PKL tentang penertiban, maka semakin baik kemampuan mempertahankan diri dijalan Merdeka Kota Bandung

2. H0 : Tidak Terdapat Hubungan Antara Persepsi PKL Tentang Penertiban Dengan Memperoleh kesejahteraan jasmaniah Dijalan Merdeka Kota Bandung

H1 : Terdapat Hubungan Antara Persepsi PKL Tentang Penertiban Dengan Memperoleh kesejahteraan jasmaniah Dijalan Merdeka Kota Bandung. Semakin baik persepsi PKL tentaang penertiban, maka semakin baik Memperoleh kesejahteraan jasmaniah dijalan Merdeka Kota Bandung

3. H0 : Tidak Terdapat Hubungan Antara Persepsi PKL Tentang Penertiban Dengan Memperoleh kesejahteraan rohaniah Dijalan Merdeka Kota Bandung

H1 : Terdapat Hubungan Antara Persepsi PKL Tentang Penertiban Dengan Memperoleh kesejahteraan rohaniah Dijalan Merdeka Kota Bandung. Semakin baik persepsi PKL tentaang penertiban, maka semakin baik Memperoleh kesejahteraan rohaniah dijalan Merdeka Kota Bandung

4. H0 : Tidak Terdapat Hubungan Antara Persepsi PKL Tentang Penertiban Dengan kemampuan mengadakan relasi Dijalan Merdeka Kota Bandung

H1 : Terdapat Hubungan Antara Persepsi PKL Tentang Penertiban Dengan kemampuan mengadakan relasi Dijalan Merdeka Kota Bandung. Semakin baik persepsi PKL tentaang penertiban, maka semakin baik Memperoleh kemampuan mengadakan relasi dijalan Merdeka Kota Bandung

**F.Definisi Operasional**

Untuk mempermudah proses penelitian maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Persepsi adalah pengalaman tantang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
2. Penyusuaian diri adalah kemampuan untuk dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa *survive*, dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah juga dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntunan-tuntunan sosial.

**TABEL 1.1**

**Operasional Variabel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Item Pertanyaan** |
| 1. Persepsi PKL tentang Penertiban (Variabel X)
 | 1. Pengalaman tentang objek Penertiban
2. Pengalaman tentang peristiwa
3. Pengalaman mendapatkan informasi
 | 1. Prosedur penertiban dari SK wali kota
2. Sosialisasi
3. Proses hukum pada saat penertiban
4. Mendapat pengawasan dan pembokaran
5. Pengalaman mendapatkan sanksi
6. Informasi Media massa
7. Informasi dari perhimpunan
 | 1. Mendapatkan penyuluhan dari pihak penertib
2. Mendaptkan perlakuan manusiawi pada saat ditertibkan
3. Pihak pemerintah lain ikut serta dalam penertiban
4. Mendapatkan himbauan penertiban dari pihak penertib
5. Mendapatkan pengarahan dari tim penertib
6. Mendapaikan informasi mengenai penertiban
7. Mengetahui proses hukum yang berlaku
8. Mengetahui Barang yang disita tidak akan dikembalikan
9. Vonis yang diterima oleh PKL
10. Mendapat teguran yang dilakukan oleh tim penertib
11. Perlawanan terhadap tim penertib
12. Pelaksaan patroli dan pengawasan oleh tim penertib
13. Pengalaman mendapatkan pertahanan dagangan
14. Mendapatkan sanksi berupa uang
15. Merasa mendapatkan hukuman yang sesuai
16. Mendapatkan Informasi dari televisi
17. Mendapatkan Informasi dari internet
18. Mendapatkan informasi dari pemerintah
19. Mendapatkan informasi dari ORMAS
20. Mendapatkan informasi dari para PKL
 |
| 2. Penyesuaian Diri (Variabel Y) | 1. Kemampuan Mempertahan kan diri
2. Pemenuhan kebutuhan jasmaniah
3. Pemenuhan kebutuhan rohaniah
4. Relasi sosial
 | 1. Menjalankan fungsi dari penertib
2. Kebutuhan pangan
3. Kebutuhan sandang
4. Kebutuhan papan
5. Kedisiplinan
6. Kesehatan jiwa
7. Kerja sama
8. komunikasi
 | 1. dapat menyesuaikan diri di tempat baru
2. Melaksanakan program secara teratur
3. Mampu mendapatkan makanan bergizi
4. Mampu membeli susu untuk anak bayinya
5. Membeli baju yang layak
6. Membeli celana yang layak
7. Mampu mengontrak rumah
8. Mampu membeli alat elektronik
9. Mampu membeli kendaraan bermotor
10. Tepat waktu pada saat pergi dari rumah
11. Tepat waktu bangun pagi pagi
12. Tepat waktu mempersiapkan dagangannya
13. Ketenangan jiwa pada saat ditertibkan
14. Kenyamanan pada saat dilingkungan
15. Hubungan yang baik dengan para pkl
16. Hubungan yang baik dengan tim penertib
17. Hubungan yang baik dengan masyarakat setempat
18. Mampu berkomunikasi baik itu dengan sesama pedagang atau pun pembeli
19. Menjaga komunikasi yang baik antar pedagang atau pembeli
20. Bersosialisasi dengan para masyarakat setempat

  |

**G. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

**1. Metode Penelitian**

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang bersifat deskriftif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian, berupa gambaran sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data yang diperoleh mula-mula dikumpulkan kemudian dianalisis, serta menguji kebenaran hipotesis yang diajukan.

**2. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel**

 Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah yang sifat populasinya homogen yaitu PKL yang sudah ditertibkan di *Basement* mall BIP dengan jumlah 70 Orang maka peneliti menggunakan teknik simpel Random Sampling (acak sederhana) dari jumlah 70 orang diambil 50% sehingga sampel menjadi 35 orang dan ini dijadikan responden.

 Menurut Soehartono (2008:57) populasi merupakan “jumlah keseluruhan unit analisis” , sedangkan Sampel adalah “bagian dari populasi yang diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya”. Cara pengambilan sampel atau teknik sampling dapat digolongkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non probability sampling. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik probability sampling dengan tipe teknik Simple Random Sampling. Seperti yang ditulis menurut Soehartono (2008:60), yaitu : “cara pengambilan sampel yang dilakukan secara acak hingga dapat dilakukan dengan cara undian”.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian antara lain sebagai berikut :

A. Studi Dokumen

 Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen, arsip, koran, artikel-artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

B. Studi Lapangan

 Teknik pengumpulan data mengenai kenyataan yang berlangsung dilapangan dengan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi non partisipan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung tetapi tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang diteliti tersebut.

2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan yang dilakukan oleh peneliti kepada Petugas Penertib

3. Angket yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis untuk di isi sendiri oleh responden dan diajukan langsung kepada responden, yaitu PKL yang berada dijalan Merdeka Kota Bandung. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan responden.

**4. Alat Ukur Penelitian**

 Alat ukur yang digunakan peneliti dalam pengujian hipotesis berupa pertanyaan yang disusun berdasarkan pedoman pada angket dengan menggunakan Skala Ordinal, yaitu skala berjenjang atau skala bentuk tingkat. Pengertian Skala Ordinal menurut Suhartono (2008:76), menyatakan bahwa :

Skala ordinal adalah skala pengukuran yang objek penelitiannya di kelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama ataupun berdasarkan ciri yang berbeda. Golongan-golongan atau klasifikasi dalam skala ordinal dapat dibedakan tingkatannya. Ini berarti bahwa suatu golongan diketahui lebih tinggi atau lebih rendah tingkatannya dari pada golongan yang lain.

Sedangkan teknik pengukuran yang digunakan adalah model Linkert, yaitu skala yang mempunyai nilai peringkat setiap jawaban atau tanggapan yang dijumlahkan sehingga mendapat nilai total. Skala ini terdiri atas sejumlah pernyataan yang semuanya menunjukkan sikap terhadap suatu objek tertentu yang akan diukur. Skala Likert bisa dengan cara membuat kategori pada setiap item pertanyaan yang diberi nilai sebagai berikut :

a. Kategori jawaban sangat tinggi diberi nilai 5

b. Kategori jawaban tinggi diberi nilai 4

c. Kategori jawaban sedang diberi nilai 3

d. Kategori jawaban rendah diberi nilai 2

e. Kategori jawaban sangat rendah diberi nilai 1

**5. Teknis Analisis Data**

 Data yang telah terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis dan kuantitatif, yaitu data yang diubah kedalam angka-angka yang dituangkan dalanm tabel. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non parametik dengan menggunakan uji Rank Spearman (rs).

 Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Menyusun skor yang diperoleh tiap responden dengan cara menggunakan masing- masing variabel.
2. Memberikan ranking pada variabel x dan variabel y, mulai dari satu sampai (1-n).
3. Menentukan harga untuk setiap responden dengan cara mengurangi ranking antara variabel x dan variabel y (hasil diketahui di)
4. Masing-masing dikuadratkan dan seluruhnya dijumlah (diketahui ).
5. Melihat signifikan dilakukan dengan mendistribusikan r ke dalam rumus :



Keterangan :

T : Nilai signifikansi hasil perhitungan

N : Jumlah responden

R : Nilai kuadrat dari korelasi Spearman

* 1. Jika terdapat angka kembar



Tx dan Ty berturut-turut adalah banyaknya nilai pengamatan X dan banyaknya nilai pengamatan y yang berangka sama untuk suatu peringkat sedangkan rumus untuk Tx dan Ty sebagai berikut :

a. Membandingkan nilai t hitung tabel dengan melihat harga-harga kritis t dengan signifikan 5% pada derajat kebebasan (df) yaitu n-2.

b. Jika tabel <t hitung maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis (H1) diterima

**H. Lokasi dan Waktu Penelitian**

**1. Lokasi Penelitian**

 Penelitian ini dilaksanakan Dijalan Merdeka Kota Bandung. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagi berikut :

1. Masalah yang diteliti berkaitan dengan kajian Kesejahteraan Sosial.
2. Lokasi penelitian sudah dikenal penulis, sehingga memudahkan penulis dalam penelitian.
3. Tersedianya data yang diperlukan guna menunjang kelancaran dari penelitian

**2. Waktu Penelitian**

 Waktu penelitian yang direncanakan penulis adalah selama delapan bulan terhitung sejak bulan November 2016 sampai April 2017, dengan waktu kegiatan yang dijadwalkan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

2. Tahap Pelaksanaan

3. Tahap Pelapora

**Tabel 1.2**

**Waktu Penelitian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Kegiatan** | **Waktu Pelaksanaan** |
| **2015-2016** |
| **Nov** | **Des** | **Jan** | **Feb** | **Mar** | **Apr** |
| Tahap Pra Lapangan |  |  |  |  |  |  |
|  | Penjajakan |  |  |  |  |  |  |
|  | Studi Literatur |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Proposal |  |  |  |  |  |  |
|  | Seminar Proposal |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyususnan pedoman wawancara |  |  |  |  |  |  |
| Tahap Pekerjaan Lapangan |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengumpulan Data |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengelolaan dan Analisis Data |  |  |  |  |  |  |
| Tahap Penyusunan Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |
|  | Bimbingan Penulisan |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengesahan Hasil Penelitian Akhir |  |  |  |  |  |  |
|  | Sidang Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |